

## **PERANAN POLITIK PEREMPUAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) DI DPRD KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Rizki Adi Setiawan, Heryani  
Email: [heryani.s.th15@gmail.com](mailto:heryani.s.th15@gmail.com)

Program Studi Hukum Tata Negara  
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) An-Nadwah Kuala Tungkal  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

### **ABSTRAK**

Perempuan harus belajar politik dan perlu mensosialisasikan pengertian baru tentang politik dan kekuasaan yang tidak selamanya bernuansa maskulin sehingga perempuan tidak harus menimalisir unsur-unsur feminitas dalam dirinya untuk mencapai tujuan politik dan kekuasaan. Partai Kebangkitan Bangsa adalah salah satu partai politik yang menyambut baik keterlibatan aktif kaum perempuan dalam dunia politik. Yang membuat kedudukan antara perempuan dan laki-laki sama di dunia politik, Keberpihakan PKB terhadap kaum perempuan dibuktikan pada saat pemilu 2019, di mana calon anggota legislatif perempuan diberikan jatah 30% dan menempati nomor urut jadi. Dan berhasil Menduduki kursi anggota DPRD kembali, dimana ini kali kedua keterwakilan perempuan Partai Kebangkitan Bangsa Memenangkan hasil pemilu diberikan amanah oleh masyarakat untuk menjabat lagi di DPRD. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Peranan Politik Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD dan mengetahui dampak peranan politik perempuan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan peran politik perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD adalah, menyuarakan hak-hak perempuan di DPRD, menyuarakan aspirasi perempuan di DPRD, dan peran nyata keterwakilan Politik perempuan pada dapil 2 adalah Melaksanakan fungsi sebagai anggota dewan yang melakukan pengawasan terhadap program-program yang ada, maupun sedang dijalankan, Memberikan usulan tentang undang-undang, Melakukan budgeting, maupun anggaran Belanja daerah, Menyerap aspirasi dari masyarakatnya terutama mengenai program pembangunan, Menjadi fasilitator (penyambung) aspirasi maupun persoalan dalam masyarakatnya, Adanya Program keluar yang dilakukan seperti bakti sosial, seminar-seminar kewanitaan.

**Kata Kunci:** Peranan, Politik Perempuan.

## PENDAHULUAN

Politik pada hakikatnya adalah kekuasaan dan pengambilan keputusan dilingkupnya sangat luas dimulai dari institusi keluarga sampai keinstansi politik formal tinggi. Pengertian Politik pada prinsipnya juga masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan kaum perempuan. Seperti apa yang disampaikan oleh Firman Allah dalam surah At-Taubat Ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”. (Q.S At-Taubat).<sup>1</sup>

Konvensi Hak Politik Perempuan, yang pada 1952 diterima PBB dan telah diratifikasikan oleh DPR menjadi UU No 68 Tahun 1958, pada Pasal 1 menetapkan bahwa: ‘Perempuan berhak memberikan suara dalam semua pemilihan dengan status sama dengan pria tanpa diskriminasi.’<sup>2</sup> Hak ini telah dilaksanakan dalam Pemilu 1955, sebelum Indonesia meratifikasi konvensi ini. Pasal 2 menyatakan: “Wanita akan dapat dipilih untuk pemilihan dalam semua badan-badan pilihan umum, yang didirikan oleh hukum nasional, dengan syarat-syarat sama dengan pria, tanpa suatu diskriminasi”.<sup>3</sup>

Perempuan harus belajar politik dan perlu mensosialisasikan pengertian baru tentang politik dan kekuasaan yang tidak selamanya bernuansa maskulin sehingga perempuan tidak harus menimalisir unsur-unsur feminitas dalam dirinya

---

<sup>1</sup>Musdah Mulia, Kemuliaan Perempuan Dalam Islam, Jakarta: PT Elex Media Komputindo: 2014, hlm. 72-73

<sup>2</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita Presiden Republik Indonesia

<sup>3</sup> *Ibid*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958

untuk mencapai tujuan politik dan kekuasaan. Perempuan tidak harus menolak gaya feminisme dan berperilaku sebagai laki-laki untuk berkuasa dan dianggap sebagai pemimpin. Sesungguhnya perempuan ketika berada dirumah tangga lebih banyak menjalankan peran kepemimpinan.<sup>4</sup>

Kuota keterwakilan perempuan diparlemen sebesar 30% seperti hanya isapan jempol belaka, karena masih didominasi politisi pria. Lembaga-lembaga Negara pun masih dikuasi kaum maskulin, belum lagi aparat pemerintah, masih amat langka wajah-wajah feminimnya.

Upaya perempuan mengambil keputusan dalam bidang politik keterlibatan perempuan dalam politik pada era reformasi menemukan momentumnya ketika disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di dalam mengajukan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: „Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.<sup>5</sup>

Negara demokrasi, peran dan partisipasi perempuan dalam politik merupakan prasyarat mutlak bagi proses demokratisasi. Pada prinsipnya perempuan merupakan pelaku politik yang paling memahami kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri. Sehingga mereka harus terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan public khususnya yang berhubungan langsung dengan kepentingan mereka. Sedikitnya ada empat strategi dan aksi yang bisa diambil yang perlu dilakukan untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam kancah perpolitikan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Musdah Mulia, *Op.Cit*, hlm. 69

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 65 (1)

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm, 57

Partai Kebangkitan Bangsa adalah salah satu partai politik yang menyambut baik keterlibatan aktif kaum perempuan dalam dunia politik. Yang membuat kedudukan antara perempuan dan laki-laki sama di dunia politik, Keberpihakan PKB terhadap kaum perempuan dibuktikan pada saat pemilu 2019, di mana calon anggota legislatif perempuan diberikan jatah 30% dan menempati nomor urut jadi. Dan berhasil Menduduki kursi anggota DPRD kembali, dimana ini kali kedua keterwakilan perempuan Partai Kebangkitan Bangsa Memenangkan hasil pemilu diberikan amanah oleh masyarakat untuk menjabat lagi di DPRD.<sup>7</sup>

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa Saja Peranan Politik Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat?.
2. Apa Dampak dari Peranan Politik Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa Di kabupaten Tanjung Jabung Barat bagi Penguatan Posisi Politik Perempuan ?

### **TUJUAN PENELITIAN**

- 1) Untuk Mengetahui Apa Saja Peranan Politik Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 2) Untuk Mengetahui Apa Dampak Peranan Politik Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa Di kabupaten Tanjung Jabung Barat bagi Penguatan Posisi Politik Perempuan.

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **1. Peranan**

Peran adalah perilaku yang sesuai dengan status seseorang, peranan merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Observasi Awal 01 Juni 2019

<sup>8</sup>Mulat Wigati Abdullah. *Sosiologi*, Jakarta:PT Grasindo, hlm53

Menurut Biddle dan Thomas yang dimaksud dengan peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.<sup>9</sup>

Suatu peran setidaknya mencakup tiga ruang lingkup:<sup>10</sup>

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

## **2. Politik**

Politik pada dasarnya adalah usaha mencapai kehidupan yang lebih baik, ada beberapa definisi politik menurut para ahli diantaranya adalah:<sup>11</sup>

- 1) Miriam Budiardjo mengatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam studi sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan dari system dan melaksanakan tujuan-tujuan itu yaitu menyangkut dari *public goals* dan *bukan private goals*.
- 2) Harold Laswell mengatakan bahwa politik adalah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan.

## **3. Peran Perempuan**

Sosialisasi kesadaran gender harus dilakukan secara kelembagaan dan meluas dan antara berbagai elemen yang focus dalam persoalan perempuan dan partai politik, parlemen dan ormas lainnya dengan target dan ukuran

---

<sup>9</sup> Sabri Shaleh Anwar. *Pelopop Al-Qur'an Kota Seribu Parit Indragiri Hilir*, KH. Bustani Kadri, Qudwah Press:2019, hlm. 64

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm. 66-67

<sup>11</sup> Andi Muh. Dzul Fadli, *Buku Ajar Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utma: 2017, hlm. 3-4

keberhasilan yang disepakati bersama. Ini penting untuk menjadikan kerja tersebut menjadi milik bersama.<sup>12</sup>

**a. Perempuan dan Partisipasi Politik**

Partisipasi perempuan dalam kancah politik merupakan keterbukaan demokrasi di Indonesia. Seperti yang dikatakan Debbie Prabawati, partisipasi politik perempuan merupakan salah satu prasyarat terlaksananya demokrasi. Karena tidak ada demokrasi yang sesungguhnya jika masih terdapat pengingkaran kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sehingga berakibat tersingkirnya perempuan dari gelanggang politik.<sup>13</sup>

**b. Perempuan dan Politik**

Menurut Lely Zailani perempuan dan politik adalah wacana yang menarik diperbincangkan, bahkan menjadi suatu yang politis untuk diperdebatkan. Hal ini disebabkan oleh fakta, ketika politik ditempatkan di wilayah publik, maka definisi, konsep dan nilai-nilai yang dikandungnya selalu menempatkan perempuan di luar area tersebut. Politik didefinisikan sebagai sesuatu yang negatif *politiking*, *afliasi* suatu politik dan dihubungkan hanya dengan mereka yang berkuasa dimana laki-laki mendominasi.<sup>14</sup>

**c. Partai Politik dan Fungsi Partai Politik**

Partai politik merupakan terjemahan dari political party yang berasal dari kata “part” yang berate bagian. Secara umum partai politik dapat diartikan sebagai suatu kelompok yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan organisasi ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.* Hlm. 44

<sup>13</sup>Rosramadhana dan Bungaran Antonius Siman Juntak. *Op.Cit.*, hlm. 10

<sup>14</sup>Rosramadhana dan Bungaran Antonius Siman Juntak. *Op.Cit.*, hlm. 9

<sup>15</sup> Aim Abdulkarim. *Pendidikan Keewarganegaraan Untuk Kelas XI*, Grafindo Media Pratama, hlm.34

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.<sup>16</sup>

**d. Sosialisasi Politik**

Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Sosialisasi politik dibagi menjadi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogic diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam social politik. Seperti sekolah, pemerintah dan partai politik.<sup>17</sup>

**e. Rekrutmen Politik**

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dalam pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam system politik pada umumnya dan pemerintah khususnya.<sup>18</sup>

**f. Hak- Hak Politik Perempuan dalam al-Quran**

Hak politik perempuan adalah hak ikut bagi warga negara dalam menangani negara.<sup>19</sup>

Kaum perempuan juga boleh berbai'at kepada Rasulullah saw sebagaimana halnya laki-laki. Allah swt memerintahkan untuk menerima bai'at dari padanya seperti dijelaskan dalam QS. Al-Mumtahanah/60:12.

---

<sup>16</sup>Ramlan Surbakti, *Op.Cit*, hlm. 149

<sup>17</sup>Ramlan Surbakti, *Op.Cit*, hlm. 117-118

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 118

<sup>19</sup>AL-FIKR Volume 17 Nomor 1 Tahun 2013 M. Tahir Maloko Partisipasi Politik Perempuan dalam Tinjauan al-Qur'an dan Hadis

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا  
وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ  
أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ  
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Wahai nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai’at (janji setia) bahwa mereka tiada akan menyekutukan sesuatu apa pun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. QS. Al-Mumtahanah/60:12<sup>20</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis dan juga dapat disebut sebagai penelitian lapangan.<sup>21</sup> Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan *social-legal*. Pendekatan ini memerlukan berbagai pendekatan ilmu social dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan ini penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih *holistic* atas fenomena hukum dimasyarakat.<sup>22</sup> Pendekatan hukum empiris diharapkan dapat mengetahui suatu peraturan-perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang pemilu no 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana bagaimana seorang peneliti penyusun dan merumuskan masalah penelitiannya dengan tepat, sebagaimana seorang peneliti

---

<sup>20</sup>Ibid, hlm. 551

<sup>21</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika: 2002, hlm. 15

<sup>22</sup> Joenedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 153

memilih metode dengan tepat untuk membangun sebuah teori. Sumber data primer didapat langsung dari Anggota Dewan Keterwakilan Perempuan Dapil II sebagai sumber pertama dengan memulai penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (Observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner dan data sekunder. Penelitian ini data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan orang lain, pada waktu dimulai data sudah tersedia. Serta sumber data tambahan berupa Politik Perempuan Partai PKB Dapil 2, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Calon Anggota Legislatif dapil 1 Partai Kebangkitan Bangsa, Masyarakat dan Dokumentasi.

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Peranan Politik Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.**

Negara demokrasi, peran dan partisipasi perempuan dalam politik merupakan prasyarat mutlak bagi proses demokrasi. Pada prinsipnya perempuan merupakan pelaku politik yang paling memahami kepentingan dan kebutuhan mereka sendiri. Sehingga mereka harus terlibat dalam setiap pengambilan kebijakan publik khususnya yang berhubungan langsung dengan kepentingan mereka. Adapun peran politik perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa kita bisa melihatnya dari uraian di bawah ini.

##### **a. Peran Politik Perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa pada Masyarakat**

Keterlibatan perempuan dalam politik dan pemerintahan merupakan suatu anugerah bagi keberlanjutan suatu negara. Ibarat negara sebuah rumah tangga, maka perempuan-lah yang memiliki peran untuk mengurus rumah serta mengatur hajat hidup seluruh penghuni rumah tersebut. Maka, dapat dipastikan bahwasanya perempuan memiliki andil yang luar biasa dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di masyarakat sendiri peran perempuan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Dapil 2 sangat dirasakan oleh

masyarakat sehingga masih percayanya masyarakat untuk memilih perwakilan perempuan pada pemilu legislatif tahun 2019, karena perannya sebagai penyambung aspirasi masyarakat dan kiprahnya pada masyarakat yang cepat tanggap dalam persoalan masyarakat, misalnya apabila terjadi musibah pada wilayah masyarakat tersebut, cepat tanggap untuk turun kelokasi yang terjadi musibah.

Peran politik perempuan pada Partai Kebangkitan Bangsa sebagai penyambung aspirasi setiap masyarakat, dan ketika mendengar salah satu wilayah terjadi musibah pasti ada kader perempuan yang muncul untuk mengecek langsung kelokasi, melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh korban, dengan begitu kita bisa membantu kebutuhan apa yang diperlukan korban, sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat”.<sup>23</sup>

Kepedulian perempuan dalam menghadapi suatu sosial yang menjadi modal politik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Perempuan pada partai Kebangkitan Bangsa tak jarang turun langsung mendengarkan aspirasi masyarakat, mengutamakan kepentingan rakyat.

Memberikan suatu edukasi kepada masyarakat juga dilakukan seperti mengadakan pelatihan kerajinan manik-manik, anyaman tali dan masak-masak dan makan-makan bersama untuk mempererat hubungan antara masyarakat dan wakil masyarakat.<sup>24</sup>

Mencermati potensi perempuan demikian, dapat dipahami bahwa perempuan dengan segala keterbatasannya memiliki potensi yang besar dalam persoalan toleransi karena memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam konteks interaksi sosial, kaum perempuan memiliki andil yang besar dalam upaya menciptakan suasana keserasian sosial. Berbagai peran yang dilakoni perempuan telah membentuknya menjadi

---

<sup>23</sup> Wawancara Dengan H. Abdul Hamid sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus Anggota DPRD Provinsi Jambi Pada Tanggal 05 Oktober 2019

<sup>24</sup> Wawancara Dengan Ibu Hj. Nurasiah, selaku keterwakilan perempuan pada Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dapil 2 Pada Tanggal 29 September 2019

pribadi yang khas. Peran yang dilakoninya tidak terbatas sebagai ibu, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang juga terlibat pada sektor publik.

b. Peran Politik Perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa Pada Partai

Partai Partai Kebangkitan Bangsa sendiri memberikan keistimewaan tersendiri kepada perempuan untuk terjun dibidang politik sehingga partisipasi perempuan bisa meningkat demi menyuarakan suara perempuan. Dengan adanya Perempuan yang didasarkan atas dasar pemikiran gender, dimana perempuan pun diberikan kebebasan menentukan sistem politik dan terlibat dalam aktifitas politik. Partai Kebangkitan Bangsa berupaya merekrut perempuan-perempuan untuk menjadi kader partai politik yang memiliki kemampuan dan kemampuan untuk mau terlibat dalam politik.

Partai Kebangkitan Bangsa sangat mengusung perempuan untuk menduduki posisi-posisi penting di politik. Kita bisa melihat ada Salah satu perwakilan perempuan menduduki kursi anggota DPRD dan sudah 2 periode pada pemilu legislatif tahun 2019, artinya masih ada kepercayaan masyarakat pada politik perempuan hal itu menjadi bukti adanya peran politik perempuan. Dikepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa sendiri mengakomodir 30% perempuan dan dipengurus harian kami menempatkan 14 perempuan diposisi wakil ketua. Mengedepankan perempuan adalah salah satu tujuan Partai Kebangkitan Bangsa supaya terlihat juga perempuan juga bisa bersaing dan memiliki peran yang penting dalam politik bukan hanya laki-laki saja".<sup>25</sup>

Fungsi rekrutmen politik sangatlah penting bukan hanya dari segi legitimasi kewenangan, tetapi juga untuk menjamin kualitas kepemimpinan bangsa pada berbagai lembaga kenegaraan baik di pusat maupun di daerah agar orang-orang yang di rekrut nantinya memiliki kualitas untuk melaksanakan jabatan itu".<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Wawancara Dengan H. Abdul Hamid sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sekaligus anggota DPRD Provinsi Jambi Pada Tanggal 05 Oktober 2019

<sup>26</sup>Wawancara Dengan H. Abdul Hamid sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sekaligus anggota DPRD Provinsi Jambi Pada Tanggal 05 Oktober 2019

Keterlibatan kader atau anggota di partai politik merupakan salah satu syarat untuk mencalonkan diri baik menjadi eksekutif maupun menjadi legislatif. Penempatan posisi perempuan dalam struktur kepengurusan partai politik dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya masyarakat dimana posisi perempuan ditempatkan di wilayah domestik sedangkan posisi laki-laki cenderung di wilayah publik. Seperti yang terlihat dalam struktur kepengurusan DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana posisi perempuan hanya berada di posisi wakil ketua dan wakil sekretaris dan bendahara.<sup>27</sup>

Peran perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanjung Jabung Barat dianggap sangat penting terbukti terlibatnya perempuan di kepengurusan dan mewakili suara perempuan di bidang politik karena perempuan memiliki kepekaan yang sangat besar dibanding laki-laki dengan kepekaan itu perempuan bisa membuat kebijakan yang sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan.

c. Peran Politik Perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD

Dalam undang-undang no 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Undang-undang tersebut mengamatkan bahwa partai setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Dalam pasal 55 ayat (2) Undang-undang no 10 tahun 2008, ditegaskan bahwa didalam bakal calon legislatif maka setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 orang bakal calon perempuan. *Legal Standing* dari tujuan pasal ini adalah untuk memperluas kemungkinan perempuan bisa langsung *terakomodir* di parlemen.<sup>28</sup>

Pada Wawancara Peneliti dengan Keterwakilan Ibu Hj. Nurasiah selaku keterwakilan perempuan pada Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus

---

<sup>27</sup>Wawancara Dengan Ibu Diah Purnama Sari Calon Anggota DPRD Dapil 1 Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tanggal 15 Oktober 2019

<sup>28</sup> Ida Fauziah. *Op.Cit*, hlm. 55

Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dapil 2 Mengatakan kaum perempuan adalah masyarakat mayoritas di Indonesia khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan tentunya perempuan punya segudang aspirasi untuk disampaikan dan dilaksanakan, Hal ini lah yang menyebabkan mengapa perempuan harus menjadi bagian dalam politik, pemerintahan dan pengambilan kebijakan. Karena hanya kaum perempuanlah yang mampu mengerti permasalahan mereka dan bagaimana cara penyelesaiannya. Kebanyakan suara aspirasi dari perempuan tidak tersampaikan dalam pembuatan kebijakan di pemerintahan karena perlunya representatif yang menampung aspirasi kaum perempuan.<sup>29</sup>

Keikutsertaan kaum perempuan dalam dunia politik merupakan suatu hal yang sering dibicarakan. Pernyataan bahwa politik adalah dunia laki-laki bila dikaitkan dengan perempuan dalam bidang politik merupakan dua hal yang saling berlawanan. Peran politik perempuan itu sangat memiliki peranan penting dalam menyuarakan suara perempuan, karena tanpa ada keterwakilan perempuan dalam hal politik maka kebijakan yang akan timbul akan tidak pro terhadap perempuan, maka dari itu peran perempuan dalam hal politik sangat di butuhkan.<sup>30</sup>

Menurut penelitian yang dilakukan penulis selanjutnya dengan mewawancarai bu Hj. Nurasih selaku keterwakilan perempuan pada Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dapil 2 mengenai apa-apa saja peran yang sudah dilaksanakan selama di DPRD adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi sebagai anggota dewan yang melakukan pengawasan terhadap program-program yang ada, maupun sedang dijalankan.
2. Memberikan usulan tentang undang-undang.

---

<sup>29</sup>Wawancara Dengan Ibu Hj. Nurasih selaku keterwakilan perempuan pada Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dapil 2 Pada Tanggal 29 September 2019

<sup>30</sup>Wawancara Dengan H. Abdul Hamid sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sekaligus anggota DPRD Provinsi Jambi Pada Tanggal 05 Oktober 2019

3. Melakukan budgeting, maupun anggaran Belanja daerah.
4. Menyerap aspirasi dari masyarakatnya terutama mengenai program pembangunan
4. Menjadi fasilitator (penyambung) aspirasi maupun persoalan dalam masyarakatnya
5. Adanya Program keluar yang dilakukan seperti bakti sosial, seminar-seminar kewanitaan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan Kehadiran perempuan di DPRD sangat mewarnai baik dalam mengusulkan pendapat maupun dalam perdebatan dalam rapat yang didominasi oleh para laki-laki. Peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama, baik berperan dalam hukum, berperan dalam politik, berperan dalam dunia pendidikan, berperan dalam dunia kesehatan, dan berperan dalam bentuk apa pun demi kemajuan dan keutuhan negara tercinta yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi, tidak ada yang bisa menyangkal bahwasannya perempuan juga bisa berperan dalam berbagai bidang yang biasanya dilakukan para lelaki, karena itu semua sudah dijamin oleh konstitusi kita serta dalam kenyataannya juga telah terbukti perempuan juga bisa memimpin.

#### **B. Dampak dari Peranan Politik Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa Dikabupaten Tanjung Jabung Barat bagi Penguatan Posisi Perempuan Perempuan.**

Selama ini posisi perempuan sebagai mayoritas pemilih belum memberikan jaminan terhadap pemenuhan kebutuhan dan kepentingan politik perempuan bahkan ada kecenderungan kuat bahwa setiap pemilu partai politik akan menggunakan isu kuota 30% sebagai salah satu strategi dalam meraih dukungan suara perempuan. Artinya suara perempuan hanya menjadi alat pengumpul suara dan belum menjadi alat control terhadap kekuasaan atau kebijakan negara berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan perempuan.

Saat ini masalah perempuan dalam politik dalam pengambilan keputusan telah mejadi isu global karena beberapa alasan.Pertama, pemerintahan oleh

(mayoritas) laki-laki dengan perspektif laki-laki (dengan sendirinya lebih menguntungkan laki-laki), tidak dapat melegitimasi “prinsip pemerintahan untuk rakyat oleh rakyat” sebagai esensi demokrasi. Hal ini disebabkan di antaranya, hak-hak politik perempuan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari hak asasi manusia, bahwa dalam demokrasi pandangan dari kelompok yang berbeda-beda termasuk berbeda jenis kelamin harus dipertimbangkan dalam setiap kebijakan, dan perempuan adalah separuh penduduk dunia dan separuh dari jumlah penduduk masing-masing negara.

Dampak dari Peran Politik Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa bagi Penguatan Posisi Politik Perempuan sangat berdampak positif dengan kehadiran perempuan di dunia politik, kebijakan kebijakan menangani perempuan sudah ada yang memperjuangkan, karena yang kita ketahui bahwa kebijakan kebijakan itu banyak di buat oleh kaum laki-laki yang tidak tau bagaimana kebutuhan perempuan itu. Setiap Pemilihan umum tingkat perwakilan perempuan di parlemen bertambah setiap pemilihannya walaupun belum signifikan jumlah yang bertambah tapi itu sudah membantu keterwakilan perempuan di parlemen. Tetapi di DPRD sendiri dalam pengambilan kebijakan adalah kolektif kolegial, hasil kebijakan tergantung dari suara yang terbanyak, maka dari itu peran perempuan di parlemen belum bisa memberikan hasil yang sangat signifikan, karena saat ini yang mendominasi menduduki anggota dewan masih banyak kaum laki-laki”.<sup>31</sup>

Dengan adanya sistem kuota bagi calon politisi perempuan ini menyebabkan perhatian masyarakat luas mulai terarah pada masalah keberadaan perempuan di kancah politik Indonesia, Representasi politik perempuan merupakan salah satu tolak ukur sampai tahap mana sebuah proses demokrasi membuahkan hasil.<sup>32</sup>

Perempuan dalam politik jelas mempunyai banyak kelebihan, ia tidak hanya akan bisa mengontrol keinginan laki-laki yang sering mau benar sendiri,

---

<sup>31</sup>Wawancara Dengan Ibu Hj. Nurashiah selaku keterwakilan perempuan pada Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dapil 2 Pada Tanggal 29 September 2019

<sup>32</sup>Wawancara Dengan H. Abdul Hamid sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekaligus Snggota DPRD Provinsi Jambi Pada Tanggal 05 Oktober 2019

rasional dan tanpa kompromi. Politik juga butuh kesabaran, keuletan, pantang menyerah yang biasanya melekat pada diri perempuan. Intinya adalah hidup ini adalah keseimbangan karena keterlibatan perempuan pada politik untuk mencapai keadilan pada akhirnya muaranya apa lagi kalau bukan usaha menciptakan keseimbangan tersebut.<sup>33</sup>

Keterlibatan Perempuan sebagai anggota DPRD secara otomatis akan memberikan kewenangan untuk turut serta dalam pembentukan Peraturan Daerah, kebijakan-kebijakan yang mementingkan kepentingan perempuan.<sup>34</sup>

### **KESIMPULAN**

Setelah dilakukan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan Politik Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat
  - 1) Peran Politik Perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa pada Masyarakat adalah perannya sebagai penyambung aspirasi masyarakat dan kiprahnya pada masyarakat yang cepat tanggap dalam persoalan masyarakat, memprioritaskan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
  - 2) Peran Politik Perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa Pada Partai adalah dengan mewakili suara perempuan karena perempuan memiliki kepekaan yang sangat besar dibanding laki-laki dengan kepekaan itu perempuan bisa membuat kebijakan yang sesuai dengan keadaan yang ada dilapangan, keterlibatan dalam kepengurusan partai politik dan menjalankan roda organisasi dan aktif pada setiap acara yang digelar baik dari DPP, DPD, maupun dari DPC sendiri.

---

<sup>33</sup>Wawancara Dengan H. Abdul Hamid sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sekaligus Snggota DPRD Provinsi Jambi Pada Tanggal 05 Oktober 2019

<sup>34</sup>Wawancara Dengan Nurdin sebagai Sekretaris DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Sekaligus anggota DPRD Provinsi Jambi Pada Tanggal 13 Oktober 2019

- 3) Peran Politik Perempuan dalam Partai Kebangkitan Bangsa di DPRD adalah, menyuarakan hak-hak perempuan di DPRD, menyuarakan aspirasi perempuan di DPRD, dan peran nyata keterwakilan Politik perempuan pada dapil 2 adalah Melaksanakan fungsi sebagai anggota dewan yang melakukan pengawasan terhadap program-program yang ada, maupun sedang dijalankan, Memberikan usulan tentang undang-undang, Melakukan budgeting, maupun anggaran Belanja daerah, Menyerap aspirasi dari masyarakatnya terutama mengenai program pembangunan, Menjadi fasilitator (penyambung) aspirasi maupun persoalan dalam masyarakatnya, Adanya Program keluar yang dilakukan seperti bakti sosial, seminar-seminar kewanitaan.
2. Dampak dari Peranan Politik Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat bagi Penguatan Posisi Politik Perempuan adalah kehadiran politik perempuan di DPRD memiliki dampak positif bagi penguatan posisi politik perempuan dimana Perempuan dalam politik jelas mempunyai banyak kelebihan, ia tidak hanya akan bisa mengontrol keinginan laki-laki yang sering mau benar sendiri, rasional dan tanpa kompromi. Politik juga butuh kesabaran, keuletan, pantang menyerah yang biasanya melekat pada diri perempuan. Secara otomatis kehadirannya akan memberikan kewenangan untuk turut serta dalam pembentukan Peraturan Daerah, kebijakan-kebijakan yang mementingkan kepentingan perempuan, yang diharapkan mampu menjadi pelopor munculnya ide-ide baru yang Pro Rakyat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma
- A.Muri Yusuf, (2017), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Amatullah Shafiyah. (2013) *Kiprah Politik Muslimah Konsep dan Implemtasinya*, Gema Insani Press.
- Andi Muh. Dzul Fadli, (2017), *Buku Ajar Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Bambang Waluyo, (2002) *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono, (1997), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja GrasindoPersada.
- Hesel Nogi S. Tangkilisan. (2005) *Manajemen Publik*, Jakarta: PTGrasindo
- Mulat Wigati Abdullah. *Sosiologi*, Jakarta: PTGrasindo.
- Musdah Mulia, (2014), *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: PT Elex Media Kompotindo.
- Ida Fauziyah. (2015) *Geliat Perempuan Pasca Reformasi; Agama, Politik, Gerakan Sosial*, Yogyakarta: PT. LKIS Pelangi Aksara.
- Joenedi Efendi, Johnny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada media Group.
- Johan Jasin. (2016) *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Markus Gunawan. (2008) *Buku Pintar Calon Anggota & Anggota Legislatif, DPR, DPRD & DPD*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka.
- Rosramadhan dan Bungaran Antonius SimanJuntak. (2018) *Strategi dan Problem Sosial Politik Pemerintah Otonomi Daerah Indonesia: Konsep Mensukseskan Otonomi Daerah*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.